

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU YANG
MENJALANKAN BISNIS PROSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/PID.SUS/2020)**

Sotar Vernando Munthe, Gunawan J. Hutapea

**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia^{1,2}
Jl. Sampul No.3, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara
Email: gunawanhutapea3103@gmail.com**

Abstrak

Untuk mendapatkan semua keinginan secara instan, wanita rela untuk bekerja menjadi PSK. Metode penelitiannya ialah normatif, bersumber dari bahan pustaka. Bahan hukumnya berupa KUHPidana, UU TPPO dan UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Hasil penelitian ini bahwa korban dari prostitusi mendapat perlindungan hukum, seperti dirahasiakan identitasnya, keadilan, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan hukum berdasarkan Pasal 43 s.d Pasal 54 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Putusan No 94 K/Pid.Sus/2020 menjelaskan perkara kasus tindakan pidana perdagangan orang, terdakwa dihukum pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, pertimbangannya adanya persetujuan dari korban untuk bekerja dengan terdakwa. Skripsi ini berjudul: **Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Yang Menjalankan Bisnis Prostitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020)**. Rumusan masalahnya ialah perlindungan hukum terhadap wanita yang dijadikan korban prostitusi dan pertimbangan Hakim memberikan putusan nomor Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Bisnis, Prostitusi.

Abstract

*To get all their desires instantly, women are willing to work as prostitutes. The research method is normative, sourced from library materials. The legal material is in the form of the Criminal Code, the TPPO Law and Law No. 31 of 2014 concerning Victim and Witness Protection. The results of this research show that victims of prostitution receive legal protection, such as keeping their identities secret, justice, restitution, rehabilitation and legal assistance based on Articles 43 to 54 of Law No. 21 of 2007 concerning TIP. Decision No. 94 K/Pid.Sus/2020 explains that in cases of criminal acts of human trafficking, the defendant was sentenced to prison for 5 (five) years based on Article 2 of Law No. 21 of 2007 concerning TIP, considering the victim's consent to work with the defendant. This thesis is entitled: **Accountability for Perpetrators Who Run a Prostitution Business (Study of Supreme Court Decision Number 94 K/Pid.Sus/2020)**. The formulation of the problem is legal protection for women who are victims of prostitution and the judge's considerations in giving Supreme Court decision number 94 K/Pid.Sus/2020.*

Keywords: Accountability, Perpetrators, Business, Prostitution.